

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGUATAN KINERJA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

JUMARIA SIRAIT^{1*}, SANGGAM SIAHAAN¹, SELVIANA NAPITUPULU¹,
SUPRAPTO MANURUNG¹, SAHAT SITOMPUL¹

¹Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
*email penulis korespondensi: jumariasirait@gmail.com

Received: 13 Juli 2021; Revision: 20 Juli 2021; Accepted: 13 Agustus 2021; Publish: 21 Agustus 2021

ABSTRAK

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar satu-satunya Perguruan Tinggi yang memiliki nomenklatur Pematangsiantar, sehingga menjadi satu ciri khas universitas dan secara tidak langsung nama ini telah menggugah dan membangun rasa memiliki yang tinggi di hati pemerintah dan masyarakat kota Pematangsiantar. Sebagai konsekuensi dari nomenklatur dan budaya kerja yang sudah terbangun sejak tahun 1954 (ketika FKIP Nommensen Medan berada di Pematangsiantar), maka sudah sepatutnya Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar membangun kemitraan melalui MoU dan MoA sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada kesempatan ini, tim pengabdian dari dosen Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sharing pengetahuan dan pengalaman untuk menguatkan kinerja DPRD Kota Pematangsiantar.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi, DPRD, Penguatan Kinerja.

PENDAHULUAN

Kampus Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBPNP) berada di Jl.Sangnualuh No.4 Pematangsiantar, Kec.Siantar Timur, Sumatera Utara. Lokasi kampus ini sangat strategis, karena arus transportasi lancar dan merupakan jalan penghubung antar kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, dekat dengan perkotaan, sehingga keberadaan kampus ini dengan mudah dapat dijangkau dari seluruh penjuru masyarakat. Disamping itu, secara geografis kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, batas seluruhnya adalah wilayah Kab.Simalungun dengan jarak tempuh 128 km dari Medan dan 50 km dari Parapat. Kota Pematangsiantar tergolong daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,20 °C dan suhu minimum rata-rata 20,8 oC pada tahun 2018. Kota Pematangsiantar memiliki luas wilayah 79,97 km² atau 011% dari luar Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berpenduduk 282.101 jiwa (RLLDP kota Pematangsiantar, 2018). Kampus UHKBPNP memiliki luas 140.000 m², tanah dan bangunan milik sendiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas HKBP Nommensen (YUHN) dengan Akta Notaris Badan Hukum Penyelenggaraan dan Perubahannya No.03 tanggal 3 Mei 2017 dan teregistrasi oleh Menteri Hukum dan HAM No.: AU-AH.01.06-004965 tanggal 8 Mei 2017. UHKBPNP mengelola 3 Fakultas, yaitu: (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP); (2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA); dan (3) Fakultas Teknik Pengelolaan Sumber Daya Perairan (FTPSDP). FKIP menyelenggarakan 10 Program Studi Sarjana, yaitu: (1) Pendidikan Bahasa Indonesia; (2) Pendidikan Bahasa Inggris; (3)

Pendidikan Bahasa Jerman; (4) Pendidikan Ekonomi; (5) Pendidikan Kewarganegaraan; (6) Pendidikan Matematika; (7) Pendidikan Kimia; (8) Pendidikan Biologi, (9) Pendidikan Fisika, dan (10). Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). FMIPA mengelola Program Studi Matematika dan FTPSDP mengelola Program Studi Teknik Mesin dan Sumber Daya Perairan. Sumber pendanaan fakultas berasal dari Yayasan Universitas HKBP Nommensen, penerimaan uang kuliah mahasiswa, bidang kerjasama, dan sumber-sumber lainnya. Sistem anggaran berbasis prodi dengan bentuk satuan tiga. Pengelolaan dana disesuaikan dengan skala prioritas prodi berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian sistem anggaran yang diterapkan sudah sesuai, transparan, dan proporsional dengan jumlah mahasiswa dan kewenangan penuh diberikan kepada masing-masing Program Studi.

Kampus juga berada di sekeliling masyarakat multietnis dan mayoritas etnis Batak yang potensial memasuki dunia PT dengan budaya kerja keras dan pantang menyerah menyekolahkan putra-putrinya sampai ke PT sebab didukung dengan filosofi “*anakhonhi do hamoraon di au*” (anakku adalah hartaku). Hal ini menjadi kekuatan juga bagi UHKBPNP untuk berkreasi sesuai dengan keberadaannya di lapangan guna mewujudkan cita-cita dan harapannya menjadi universitas unggul dan berdaya saing berbasis on line dengan *Motto Pro Deo Et Patria*, yaitu melayani untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Melalui motto ini, UHKBPNP adalah asset semua umat, milik semua warga, terbuka kepada seluruh masyarakat, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, sosial, budaya, suku dan ras. Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar satu-satunya Perguruan Tinggi yang memiliki nomenklatur Pematangsiantar, sehingga menjadi satu ciri khas universitas dan secara tidak langsung nama ini telah menggugah dan membangun rasa memiliki yang tinggi di hati pemerintah dan masyarakat kota Pematangsiantar. Sebagai konsekuensi dari nomenklatur dan budaya kerja yang sudah terbangun sejak tahun 1954 (ketika FKIP Nommensen Medan berada di Pematangsiantar), maka sudah sepatutnya UHKBPNP membangun kemitraan melalui MoU dan MoA sesuai dengan tri dharma PT, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada kesempatan ini, UHKBPNP melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui sharing pengetahuan dan pengalaman untuk menguatkan kinerja DPRD Kota Pematangsiantar. Kegiatan ini merupakan kerjasama tim pengabdian dari dosen Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar dengan pihak DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2021.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan Abdimas melalui melalui sharing pengetahuan dan pengalaman untuk menguatkan kinerja DPRD Kota Pematangsiantar berlangsung pada hari Jumat-Sabtu, tanggal 18-19 Juni 2021 yang dimulai pada jam 8.30 Wib sampai selesai. Dengan dihadiri 19 orang anggota DPRD Kota Pematangsiantar, dengan tempat pelaksanaan di Aula Gedung DPRD Kota Pematangsiantar. Adapun nama-nama tim dosen pengabdian sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah : 1). Dr. Jumaria Sirait, M.Pd., 2). Prof. Dr. Sanggam Siahaan, M.Hum., 3). Prof. Dr. Selviana Napitupulu, M.Hum., 4). Drs. Suprpto Manurung, M.S., 5). Sahat Sitompul, S.T., M.T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara persekolahan di tingkat pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Perguruan tinggi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Semenjak era kemerdekaan, pengalaman Indonesia dalam pengelolaan pendidikan tinggi terhitung baru berjalan sekitar 63 tahun, yang diawali pada 1949-1950 dengan kehadiran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri tertua di Indonesia, yang berlokasi di Yogyakarta, didirikan pada 19 Desember 1949 dan merupakan universitas pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Sedangkan Universitas Indonesia memiliki sejarah lebih panjang lagi, yaitu 1849 sebagai Dokter-Djawa School dan berubah sebagai Universiteit Indonesia pada tahun 1950. Dalam interval perjalanan panjang itu, perguruan tinggi menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak sama dari masa ke masa. Setiap masa memiliki tantangan masing-masing yang harus disikapi dengan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi yang dinamis dan kompeten. Namun, perjalanan dunia pendidikan tinggi dengan berbagai tantangannya tersebut memiliki satu pertanyaan mendasar, yang bisa juga dikatakan sebagai ekspektasi, yang selalu ditanyakan masyarakat yaitu: ***“Apa yang telah dikontribusikan perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?”*** Jawabnya adalah Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar hadir untuk seluruh masyarakat, termasuk Pemko Pematangsiantar. Hal ini tercermin dalam visi universitas ***“Menjadi Universitas unggul dan berdaya saing di tingkat global yang berbasis teknologi informasi (online) menuju generasi industri berkelanjutan berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria)”***.

Visi UHKBPNP visioner, sehingga dirumuskan beberapa **misi** untuk mencapai visi tersebut sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen untuk mewujudkan implementasi Tri Tugas Panggilan Gereja dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.
2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.
3. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (*science and technology led development*).
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka upaya menghasilkan lulusan yang handal, berkarakter, berbudaya dan beretika sesuai motto *“Pro Deo et Patria”*.
5. Menyelenggarakan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.

Tujuan yang ingin dicapai UHKBPNP adalah:

1. Membentuk cendekiawan yang memiliki nilai-nilai nasionalisme dan Kristiani menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang berjiwa nasionalisme melalui pendidikan pengajaran yang bermutu.
3. Turut serta membangun masyarakat Indonesia berlandaskan jiwa nasionalisme dan kasih melalui penelitian yang unggul dan kompetitif.
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter nasionalisme, nasionalisme, kompetitif inovatif dibidangnya serta bermartabat sebagai bagian dari dominasi global yang didukung oleh kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. Menghasilkan kerjasama local, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendorong pengembangan kebudayaan batak.

Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan UHKBPNP adalah sesuai renstra universitas tahun 2018-2022 adalah sbb:

1. Memperkuat tata pamong, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.
2. Pengembangan mahasiswa.
3. Pengembangan sumber daya manusia.
4. Pengembangan keuangan, sarana, dan prasarana.
5. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
6. Pengembangan penelitian.
7. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat, dan
8. Menghasilkan lulusan dan capaian tridharma.

Berdasarkan VMTS universitas di atas, kegiatan kerjasama bidang tri dharma sangat dibutuhkan, terutama dengan pemerintah daerah selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan universitas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan UHKBPNP ke DPRD Kota Pematangsiantar memiliki kebermanfaatan kedua belah pihak, dan kegiatan ini menjadi sangat penting.



Gambar 1: Foto Bersama Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dan Tim Pengabdi

Pemerintahan kota Pematangsiantar adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Pematangsiantar memiliki luas wilayah 79,97 km², memiliki 8 kecamatan serta 53 kelurahan. Letak kota sangat strategis, karena merupakan jalan raya lintas Sumatera dan tergolong daerah tropis. Prioritas pembangunan kota Pematangsiantar meliputi: sektor Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik,

Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi dan Prioritas lainnya adalah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Perekonomian, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Visi pemerintahan kota Pematangsiantar merunut Visi, Misi RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yaitu: ***"Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Rangka Mendukung Perwujudan Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju dan Jaya"***. Untuk mewujudkan visi tersebut, diturunkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Memperkuat sistem ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
6. Menata sistem pelayanan publik yang lebih baik dan professional
7. Menata sistem alokasi dana penggunaan anggaran yang efisien dan pro rakyat

Strategi dan arah kebijakan pemerintahan kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan kebijakan "Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi kepada publik tentang kinerja pemerintah".
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan arah kebijakan: "Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan, pemerataan pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat".
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan "Meningkatkan daya saing standar mutu tenaga kerja, kualitas pendidikan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja".
4. Pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi tentang kesehatan dengan arah kebijakan "Meningkatkan pemberdayaan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera; Peningkatan peran RSUD, Puskesmas dan Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan : meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat".
5. Peningkatan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi dengan arah kebijakan "Meningkatkan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi"
6. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam optimalisasi potensi perdagangan dan pariwisata dengan arah kebijakan "Meningkatkan perluasan kesempatan usaha melalui optimalisasi potensi perdagangan dan pariwisata".
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan manajemen pembangunan kota, dengan arah kebijakan "Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan manajemen masalah perkotaan".
8. Pembangunan dan pengembangan kawasan kota yang berwawasan lingkungan, dengan arah kebijakan "Mengembangkan kawasan kota dengan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang berkualitas dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah".
9. Percepatan proses pelayanan perijinan, dengan arah kebijakan "Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan serta efisiensi birokrasi".
10. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dengan arah kebijakan "Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan".

11. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan penerimaan daerah, dengan arah kebijakan “Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan penerimaan daerah”.
12. Perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan pengangguran terbuka, dengan arah kebijakan “Meningkatkan anggaran untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin dan penyediaan lapangan kerja”.



Gambar 2: Tim pengabdian sharing pengetahuan dan pengalaman untuk menguatkan kinerja DPRD Kota Pematangsiantar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang anggota DPRD adalah sbb:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

8. Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3: Tim pengabdian mendengarkan pemaparan dari Ketua DPRD Kota Pematangsiantar.

Salah satu misi pemerintahan kota Pematangsiantar adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan arah kebijakan: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan, pemerataan pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat”. Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar sebuah institusi Perguruan Tinggi yang mengelola 3 fakultas untuk memproduksi calon lulusan yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan visinya. Ketiga fakultas ini dapat mengkafer kebutuhan pemerintah daerah Pematangsiantar, terutama meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat sistem ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, menata sistem pelayanan publik yang lebih baik dan profesional, dan menata sistem alokasi dana penggunaan anggaran yang efisien dan pro rakyat. Peran DPRD diharapkan dapat menjembatani ketiga fakultas UHKBPNP dengan pemerintahan kota Pematangsiantar dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi pemerintahan kota Pematangsiantar. Permasalahan yang meresahkan masyarakat saat ini adalah pandemi covid-19, kemiskinan, pengangguran, korupsi, ketimpangan sosial, layanan sektor publik, penegakan hukum, dll. yang berdampak pada pola tindak kaum terdidik, keyakinan, pola pikir, dan pola belajar. Hal ini menjadi pergumulan dunia, termasuk akademisi untuk mencari pemecahan masalah dan solusinya. UHKBPNP hadir untuk kita semua yang diharapkan sebagai pusat pembelajaran

(center learning) untuk menyampaikan informasi aktual, terdidik, dan bermartabat. UHKBPNP juga berkeinginan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai terobosan baru untuk dunia pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan/luaran Perguruan tinggi.

SIMPULAN

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar satu-satunya Perguruan Tinggi yang memiliki nomenklatur Pematangsiantar, sehingga menjadi satu ciri khas universitas dan secara tidak langsung nama ini telah menggugah dan membangun rasa memiliki yang tinggi di hati pemerintah dan masyarakat kota Pematangsiantar. Sebagai konsekuensi dari nomenklatur dan budaya kerja yang sudah terbangun sejak tahun 1954 (ketika FKIP Nommensen Medan berada di Pematangsiantar), maka sudah sepatutnya Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar membangun kemitraan melalui MoU dan MoA sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan DPRD Kota Pematangsiantar dalam rangka kemajuan bidang pendidikan yang ada di kota Pematangsiantar.

REFERENSI

(https://berita.pematangsiantar.go.id/?page_id=69)

RLLDP Kota Pematangsiantar (2018).

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.

RIP Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBPNP) Tahun 2018-2038.

Renstra Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar (UHKBPNP) Tahun 2018-2022.

Resntra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Tahun 2018-2022.